

Nomor : B/ 646 /RB.06/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2022

6 Desember 2022

**Yth. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**  
di

Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2022 adalah **63,77** dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
<b>A.</b>	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	12,50	12,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,39	5,74
	III. Reform	30,00	13,02	13,09
	<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>30,91</b>	<b>31,81</b>

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,20	7,20
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,50	9,52
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,27
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,34	6,97
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>29,24</b>	<b>31,96</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>60,15</b>	<b>63,77</b>

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Terdapat 10 hasil antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Sistem Merit	0-400	253,5	265,5	KASN
2.	Kualitas Kebijakan	0-100	-	-	LAN
3.	Kualitas Pengelolaan Aset	0-4	2,69	3,51	Kementerian Keuangan
4.	Profesionalitas ASN	0-100	42,41	41,25	BKN
5.	Implementasi SPBE	0-5	1,42	2,32	Kementerian PAN RB
6.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	66,67	21,80	LKPP
7.	Kualitas Pengelolaan Anggaran		-	89,30	Kementerian Keuangan
8.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	-	3,64	Kementerian PANRB
9.	Maturitas SPIP	0-5	2+	2	BPKP
10.	Kapabilitas APIP	0-5	1	2	BPKP
11.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	-	-	Ombudsman Republik Indonesia
12.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	-	-	ANRI
13.	Reformasi Hukum	0-100	-	80,05	Kementerian Hukum dan HAM



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat indeks hasil antara yang mengalami peningkatan seperti sistem merit, kualitas pengelolaan aset, implementasi SPBE, Kapabilitas APIP. Meskipun demikian ASN yang profesional, dan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengalami penurunan. Terdapat indeks hasil antara yang baru dilakukan penilaiannya pada tahun 2022 yaitu kualitas pengelolaan anggaran, kualitas pelayanan publik, dan reformasi hukum. Lebih lanjut, masih terdapat indeks hasil antara yang belum dilakukan penilaian yaitu kepatuhan terhadap kualitas kebijakan, standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip.

3. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:
  - a. Pemetaan dan penyelarasan produk kebijakan dan analisa terhadap kebijakan lain yang terkait dengan keberadaan dan fungsi lembaga;
  - b. Melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri dan telah diajukan untuk dievaluasi oleh KemenPANRB;
  - c. Melakukan pengelolaan informasi publik dengan cukup baik sehingga mendapatkan penilaian keterbukaan informasi publik dengan nilai 83,72 (menuju informatif);
  - d. Melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk beberapa jenis layanan.
4. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:
  - a. Dalam manajemen perubahan:
    - Belum dilakukan monitoring evaluasi atas rencana pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) secara komprehensif untuk memastikan target-target pembangunan RB dapat tercapai;
    - Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi.
  - b. Penerapan RB yang dilakukan masih berfokus pada pelaksanaan di lembaga, sedangkan penerapan pada unit kerja belum optimal;
  - c. Belum dilakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan belum terdapat penilaian kualitas kebijakan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sehingga belum diketahui kualitas perumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  - d. Peta proses bisnis belum disusun secara menyeluruh dan belum seluruhnya dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh aktivitas yang ada;
  - e. Belum memiliki standar kompetensi jabatan dan kebijakan manajemen talenta masih dalam proses penyusunan;

- f. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengawasan seperti Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan *Whistle Blowing Systems* (WBS);
  - g. Proses audit telah dilakukan secara rutin namun belum sepenuhnya selaras dengan standar audit yang ada;
  - h. Telah melakukan praktik pengendalian internal namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya belum melibatkan seluruh unit organisasi. Efektivitas pengendalian internal belum dievaluasi secara berkala sehingga banyak kelemahan yang belum tertangani secara memadai;
  - i. Maklumat pelayanan dan standar pelayanan masih dalam proses penyusunan dan belum dilakukan penilaian atas kepatuhan pelaksanaannya.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	61,20	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	95,20	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,74	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	82,20	SPI Internal oleh KPK

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup penilaian atas capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

6. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
- a. Melakukan monev atas capai rencana pembangunan RB dan mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlik, area perubahan dalam reformasi birokrasi, serta mengukur tingkat keberhasilannya;
  - b. Melakukan penguatan dan penajaman pelaksanaan program reformasi birokrasi pada lembaga dan unit kerja, agar memberikan dampak yang konkret dan signifikan;
  - c. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan LAN untuk memastikan pelaksanaan penilaian kualitas kebijakan;

- d. Memastikan keberadaan dan kualitas peta proses bisnis untuk setiap levelnya serta keberadaan SOP untuk seluruh aktivitas yang ada;
- e. Melaksanakan perbaikan kinerja unit pengelola pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- f. Mempercepat proses penyusunan standar kompetensi jabatan dan memastikan manajemen talenta untuk segera dapat diterapkan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle-blowing system*, dan benturan kepentingan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas sistem pengawasan;
- h. Melaksanakan audit sepenuhnya berdasarkan standar yang berlaku serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian internal secara berkala;
- i. Mempercepat proses penyusunan maklumat dan standar pelayanan dan memastikan pelaksanaan penilaian atas kepatuhan pelaksanaannya.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan**



**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.